

POLITIK MASYARAKAT, NEGARA, DAN KESENIAN

Aprinus Salam

Pusat Studi Kebudayaan, UGM
aprinussalam@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini berusaha menjelaskan bahwa pada masa pasca Orde Baru negara mengalami penurunan legitimasi dan posisi masyarakat menguat. Dalam situasi itu, masyarakat mendapat kesempatan untuk melakukan berbagai artikulasi dan politisasi dalam berbagai aspeknya. Masyarakat mendefinisikan dan mengidentifikasi dirinya kembali dalam berbagai negosiasi primordialitas, lokalitas, nasionalitas, dan globalitas. Banyak kelompok warga mengambil inisiatif dan cara sendiri-sendiri dalam mencapai tujuan dan kepentingannya. Dalam praktik berkesenian, masyarakat mengambil inisiatif lebih dalam orientasi bisnis atau politik-ekonomi sehingga partisipasi kesenian dalam proses peningkatan kualitas bermasyarakat dan bernegara dianggap tidak signifikan. Negara mengalami kegagalan dalam menentukan kapasitas, kompetensi, dan otoritas dirinya. Masyarakat berjalan “tanpa kontrol” yang berarti dari negara. Berbagai dikotomi dalam masyarakat terus memicu berbagai pertentangan dan konflik yang tidak kondusif bagi proses pembangunan. Hal yang selayaknya dimainkan oleh negara adalah mencairkan berbagai dikotomi tersebut dengan memanfaatkan ruang alternatif, ruang ketiga, dalam hal itu ruang kesenian/sastra. Dalam ruang alternatif tersebutlah berbagai negosiasi dan konsolidasi diharapkan dapat terjadi secara lebih demokratis dan bermartabat.

Kata kunci: politik masyarakat, negara, kesenian, ruang alternatif

Abstract

This paper explores how post-New Order Indonesia has seen a declined emphasis on government legitimization and an increased emphasis on the power of the populace. In this situation, the populace (society) has the opportunity to perform articulation and politicization from a variety of aspects. Society redefines and reidentifies itself through various negotiations of primordiality, locality, nationality, and globality. Many groups take their own initiative and use their own methods to reach their goals and protect their interests. In creating art, society is generally oriented towards art as business or a political-economic act, such that the role of art in promoting social and national development is considered insignificant. The State is impeded in determining its own capacity, competence, and authority. Society acts "without control", or more specifically without control from the State. The numerous dichotomies in society continually create opposition and conflict, which stunts the development process. The State should be able to diffuse these various dichotomies by utilizing alternative spaces, third spaces - such as art and literature. In these alternative spaces, it is hoped that negotiation and consolidation can be conducted in a more democratic and dignified manner.

Keywords: politic of society, state, art, alternative spaces

1. Pengantar

Terdapat sejumlah implikasi yang berbeda, dan mungkin sedikit berseberangan, berkaitan dengan dua kecenderungan besar yang terjadi beberapa tahun terakhir. Pertama, kekuatan daya atur dan formasi global yang mengonstruksi masyarakat menjadi masyarakat jaringan (meminjam istilah Manuel Castells, 2001). Dalam bahasa lain dapat pula disebut sebagai kekuatan konstruksi kapitalisme. Hal itu ditandai dengan kecenderungan pada sebagian masyarakat Indonesia untuk memilih menjadi bagian dari warga (jaringan) dunia dan/atau kecenderungan kapitalisme kultural.

Pada tingkat kewacanaan, dalam sastra, hal tersebut ditandai dengan novel *Saman* (1999) karya Ayu Utami, *Supernova* (2001) karya Dewi Lestari, dan beberapa karya yang lain. Beberapa novel dalam *chicklit* dan *teenlit* Indonesia, yang terkenal misalnya *Dealova* (2000) karya Dyan Nuranindya, kemudian novel ini juga difilmkan, para tokohnya hampir tidak pernah berpikir dalam posisi sebagai warga Indonesia. Beberapa tokoh dalam film *Cinta Silver* (2005) bahkan sudah menjadi bagian dari warga dunia. Dalam sinema Indonesia (sinetron), kehadiran anak muda yang kaya yang “hanya” bermasalah dalam perebutan dan mendapatkan cinta dan penikmatan gaya hidup (global) dapat disaksikan bersama.

Kedua, daya tarik wacana kemandirian yang mengedepankan wacana lokal dan secara politik adalah praktik desentralisasi yang bertumpu pada kemandirian daerah. Sebagian warga dikondisikan untuk melakukan aktivitas dengan basis lokalnya masing-masing. Dalam kesusastraan, isu dan wacana sastra lokal yang telah ramai dibicarakan pada tahun 1980-an kembali mendapatkan legitimasinya. Novel Kuntowijoyo dalam *Mantra Penjinak Ular* (2000) dan *Wasripin dan Satinah* (2003) serta sejumlah cerpen yang ditulis oleh para cerpenis Indonesia, secara umum dapat dianggap mencoba mengangkat cerita dengan basis daerah atau lokalitasnya masing-masing. Tidak ketinggalan sinetron Indonesia, cerita silat dengan basis cerita masa lalu dan lokalitas tertentu serta sinetron dakwah dengan *gugon tuhon* yang dipercaya oleh pemeluk daerah tertentu merupakan contoh yang terbentang di televisi kita.

Namun, keduanya bergerak secara sporadis, tumpang tindih, walaupun dalam beberapa hal berjalan sendiri-sendiri berupaya menemukan bentuknya yang paling signifikan.

Keterangan di atas hanya ingin memberikan suatu pengertian bahwa setiap warga berhak dan memiliki kebebasan dalam mendefinisikan dan mengidentifikasi dirinya, dan bersama-sama “bertujuan”, menjadi manusia individual ataupun kolektif dalam pilihannya masing-masing. Persoalannya adalah bagaimana menempatkan persoalan tersebut dalam konstelasi cara kesenian ikut berpartisipasi dalam mengembangkan pelebagaan bermasyarakat dan bernegara yang kondusif bagi proses pembangunan yang menyajahterakan dan mengadakan?

2. Politisasi Atas Nama dan Proses *Othering*

Dalam ranah masyarakat, keduanya cenderung bergerak atas nama demokrasi dan kebebasan berekspresi. Implikasi pertama, dalam pengertian “negatif” berujung pada krisis identitas atau dalam pengertian agak “positif” sebagai multiidentitas. Kepercayaan dalam batas etnisitas, agama, ras, bahasa, gender, dan geopolitik sebagai basis pembentukan identitas juga rasa kebangsaan mungkin mengabur atau dimanfaatkan sekaligus. Pada umumnya, kecenderungan pertama terlihat dalam masyarakat kota dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi, kemudahan akses terhadap teknologi, serta sumber ekonomi yang beragam dan banyak. Bisa jadi mereka itulah yang disebut para elite, dalam berbagai tingkatannya. Tidak tertutup kemungkinan, walaupun mereka dalam banyak hal merupakan bagian dari masyarakat jaringan, masyarakat global, tetapi justru untuk kepentingan politik di tempatnya masing-masing, mereka memobilisasi wacana primordial atau lokal.

Implikasi kedua, justru sebaliknya, yakni ketika batas identifikasi dan identitas tersebut dipertegas atau mengalami radikalasi. Berita kekerasan dan konflik banyak terjadi di daerah Indonesia, baik atas nama agama, seperti di Poso, Maluku, dan lain-lain (termasuk di dalamnya merebaknya formalisasi syariah Islam dalam perda), seperti di Bulukumba, Nusa Tenggara Barat, beberapa daerah di Sumbar, Bandjar, dan Aceh), etnisitas, golongan dan kelas, batas daerah dan pemekaran (beberapa daerah di Papua, Sulawesi Selatan, dan NTB), maupun atas nama demokrasi (apapun). Di balik itu juga, atas nama otonomi daerah merupakan menu sehari-hari yang tampaknya belum akan berujung.

Sebagai risikonya, energi masyarakat banyak terkuras untuk hal yang sangat politis

(politisasi). Hal yang cukup berbahaya yang dapat diperhitungkan adalah bahwa apresiasi masyarakat dalam pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan, yang pada masa Orde Baru dimonopoli dan “dihegemoni” negara, berkembang menjadi virus-virus yang merusak persatuan dan kesadaran terhadap sesama orang Indonesia (nasionalisme Indonesia). Terdapat proses *othering* yang memisahkan kesamaan dan persamaan untuk menjadi Indonesia. Di Riau, misalnya, terdapat perlawanan dan upaya pembedaan dari penduduk asli Melayu terhadap dominasi Minang, Batak, dan Jawa. Di Bali, dengan wacana ajeg Bali, terdapat “permusuhan dengan segala sesuatu yang di-“Jawa”-kan. Di satu tempat di Sumbar dan di Jabar, para PNS harus memakai jilbab bagi wanita jika bekerja. Di Bulukumba muncul perda syariah dan harus dapat mengaji jika ingin bertemu dengan bupati, dan sebagainya. Warga yang tidak patuh dianggap orang lain, bahkan mungkin musuh.

Hal utama yang ingin dikatakan adalah saat ini negara Indonesia sedang berada dalam satu situasi yang sama sekali tidak kondusif bagi bertumbuhnya *nation* keindonesiaan, rasa persaudaraan dan persamaan. Masyarakat Indonesia dikondisikan untuk menyelamatkan dirinya masing-masing, untuk berjaya-kaya sendiri-sendiri. Kondisi itu, seperti diketahui, merupakan proses panjang sejarah Indonesia. Setelah 1998, dan biasanya kita menyebut era Reformasi, kondisinya tidak lebih menjanjikan. Utang Indonesia menumpuk hingga lebih 2.000 triliun lebih, kualitas SDM menurun menjadi peringkat 112 menurut Human Index Report United Nations Development Programme tahun 2009, pengangguran yang tercatat lebih dari 38 juta orang, teror bom, masyarakat melakukan penjarahan dan berkelahi di sejumlah tempat, kriminalitas meningkat tajam, proses pemiskinan meroket, penegakan hukum tersendat-sendat, dan sebagainya. Akan tetapi, di sisi lain yang lebih abstrak, sisi positif dari era beberapa tahun belakangan ini adalah bahwa gerakan sosial dan dinamisasi masyarakat dianggap lebih proaktif dan mengalami penguatan. Masyarakat seperti mengalami proses menuju kebebasan dan rasa percaya diri sebagai manusia warga dengan pilihan basisnya masing-masing.

Dalam situasi ketika masyarakat melakukan banyak keberanian dan percaya diri dan dengan caranya sendiri-sendiri sehingga terkesan anarkis dan negara tampak tidak mampu melakukan sikap dan peran strategis untuk mengontrol “anarkisme” tersebut. Elite negara sibuk mengurus

konsolidasi dan penguatan kekuasaannya demi kekuasaan itu sendiri, yang berakses langsung dengan konglomerasi modal-ekonomi, dengan mengorbankan pion kecil (rakyat Indonesia). Sebaliknya, sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam tekanan kemiskinan yang berimplikasi luas terhadap cara mengatasi permasalahan hidup. Akhirnya, seperti dapat kita rasakan bersama, ruang keteraturan dan kehidupan yang adil, dan sehat-sejahtera mengecil. Ruang ketidakteraturan, kebiadaban, dan kemaksiatan membesar.

Ada beberapa hal yang menyebabkan negara tidak mampu memainkan peranan penting dalam mengatur, menertibkan, dan mendisiplinkan masyarakat. Pertama, negara (khususnya pemerintah yang diberi mandat) berdiri dalam satu krisis sejarah politik pasca Orde Baru yang digugat sehingga ada ketakutan dan ketidakpercayaan diri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Konsep negara seperti yang diteorikan oleh Weber, yakni satu institusi yang berhasil memiliki monopoli hukum untuk menggunakan kekerasan fisik di suatu wilayah tertentu dan menjadi praktik bernegara di Indonesia pada masa Orde Baru telah mengalami berbagai perubahan.

Memang, sejumlah tokoh kunci dan tokoh penting pada pemerintahan pasca-Orde Baru masih merupakan bagian panjang dari tradisi politik yang diwariskan oleh pemerintahan Orde Baru. Namun, pemerintahan yang baru di Indonesia mengalami kegagalan dalam memilih cara dan gaya memerintah sehingga karena kegagalan tersebut, otoritas, kapasitas, dan kompetensi negara menjadi sangat berkurang. Akibatnya, masyarakat tidak taat dan tidak takut kepada negara. Segala aturan yang dibangun oleh negara cenderung dilawan. Perlawanan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah dan perlawanan terhadap perda-perda, yang didemonstrasi oleh berbagai kalangan dan menimbulkan kerusuhan adalah beberapa contoh yang dapat dikemukakan.

Kedua, tarik ulur dan kompromi politik menyebabkan pemerintah yang diberi mandat tidak mampu mengambil kebijakan yang tegas dan berwibawa atau kebijakan yang diambil tidak begitu berpengaruh di tingkat operasional. Pemerintah yang diberi mandat dikondisikan untuk menyelesaikan permasalahan insidental dan darurat sehingga tidak terbantu untuk berpikir panjang dalam membangun negara yang kuat. Di samping itu, rendahnya integritas dan kualitas SDM yang berposisi sebagai aparatus negara, seperti kepolisian, kejaksaan dan peradilan, aparat

pendidikan, ataupun instrumen politik lainnya, merupakan masalah krusial yang hingga hari ini masih menjadi salah satu masalah utama negeri ini.

Ketiga, negara juga tidak memainkan peranan penting dalam membangun dan mengelola imajinasi ruang ketiga, mengikuti perspektif Bhaba (1994), yakni negara sama sekali hampir tidak mendukung program pengembangan wacana dalam membangun imajinasi berbangsa dan bernegara yang seharusnya dapat dimainkan oleh, misalnya, film, sinema, sastra, atau bahkan teater. Dunia seni hanya dan ditujukan untuk keperluan bisnis merupakan contoh yang dapat dikaji lebih jauh.

Masalah besar lain, yang tidak sepenuhnya menjadi masalah lemahnya peran negara, yakni buruknya sistem rekrutmen kepegawaian, tidak jelasnya visi dan misi pendidikan nasional yang tampak pada kurikulum dan muatan materi pelajaran, serta banyak aspek lain yang menyebabkan Indonesia terperosok jauh menjadi bangsa yang lemah, karut-marut, dan masalah-masalah yang menimpa terus menerus bergantian. Perubahan yang cepat dalam konsolidasi, sistematisasi, dan transformasi politik memperparah kualitas kehidupan politik Indonesia. Kita tahu, di sejumlah tempat di Indonesia, yang menjadi tokoh legislatif dan eksekutif adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman dan tradisi politik dan intelektual apa pun, ada yang mantan preman, atau mereka yang tidak jelas apakah pernah mengenyam bangku sekolah tingkat sekolah menengah atas atau tidak. Akan tetapi, tentu saja mereka berhak menjadi apa pun yang mereka inginkan.

Masih terdapat permasalahan lain, apakah jika negara memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengatur, menertibkan, dan mendisiplinkan masyarakat, negara akan terjebak kembali menjadi negara otoriter. Seperti akan disinggung kemudian, kemampuan yang tinggi yang dimiliki

negara dalam mengatur, menertibkan, dan mendisiplinkan masyarakat bukan dalam rangka membangun kekuasaan negara demi segelintir aparat penguasa, melainkan pemilikan kekuatan yang memaksa demi terjaganya keamanan, kesejahteraan, tegaknya hukum, keadilan sosial dan ekonomi, serta demokrasi.

Dalam kondisi itu, kita dihadapkan dalam dua hal, yakni mempertimbangkan dua pilihan yang mungkin tidak begitu membuat nyaman. Pertama, apakah negara diberi mandat sepenuhnya untuk melakukan pemaksaan demi tegaknya keadilan dan demokrasi dengan risiko negara menjadi kuat atau kedua, justru membiarkan masyarakat bersaing di dalam dirinya sendiri untuk mencoba segala cara atas nama keadilan dan demokrasi, tetapi yang terjadi adalah anarki. Berjangkitnya kelompok-kelompok yang menginginkan berkurangnya “kemaksiatan sosial”, misalnya, dan kemudian melakukan tindakan kekerasan adalah contoh-contoh yang dapat dikedepankan.

Ada ketakutan lain, jangan-jangan jika negara diberi wewenang untuk memiliki kemampuan yang kuat dalam menegakkan keteraturan, ketertiban, dan kedisiplinan, akan kebablasan dan seberapa jauh masyarakat akan memiliki kekuatan dalam mengontrol hal itu? Seberapa jauh dan mendesak Indonesia memerlukan negara yang kuat? Amerika, Jerman, Prancis, dan beberapa negara lain adalah contoh negara yang kuat dan dengan kehidupan demokratis yang cukup terpelihara. Artinya, ketakutan terhadap negara yang kuat akan mematikan demokrasi sangat mungkin merupakan ketakutan yang tidak terlalu beralasan. Akan tetapi, tentu saja trauma sejarah dan beberapa kondisi budaya dalam masyarakat Indonesia terhadap ketakutan negara yang kuat memang merupakan alasan yang harus dipertimbangkan.

Berangkat dari kenyataan di atas, saat ini dapat dipaparkan konstelasi dikotomis dalam masyarakat Indonesia. Pertama, terjadinya oposisi antara tuntutan untuk menjadi warga (jaringan) dunia berhadapan dengan kehendak untuk tetap merupakan bagian dari identitas warga nasional Indonesia. Dalam praktiknya, bentuk oposisi itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Paling tidak, secara ideologis tidak berdampak pada konflik-konflik yang berhadapan secara langsung. Permasalahan yang muncul lebih pada tingkat wacana, di samping arena permainan oposisi itu relatif sangat besar sehingga risiko untuk berhadapan (fisik) secara langsung juga sangat kecil.

Apakah jika negara memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengatur, menertibkan, dan mendisiplinkan masyarakat, negara akan terjebak kembali menjadi negara otoriter.

Kedua, terjadinya oposisi antara tuntutan untuk tetap mempertahankan identitas Indonesia dengan basis nasional keindonesiaan berhadapan dengan tuntutan identitas keindonesiaan dengan basis lokal-lokal, termasuk di dalamnya basis agama, geografi (kewilayahan), bahasa, suku, atau bahkan ras. Hal yang menjadi permasalahan adalah bahwa ruang permainan oposisi itu dapat sangat menyempit dan menimbulkan pertentangan yang bersifat langsung. Tampaknya, berbagai kasus dan ketegangan yang sedang terjadi saat ini lebih didominasi oleh permainan oposisi itu. Kasus kartun Nabi Muhammad areal oposisinya secara kewilayahan memang terkesan besar, tetapi ruang wacana yang dipolitisasi justru diperkecil (primordial) sehingga benturan fisik tampaknya tidak dapat dihindari.

Sebagai akibatnya, karena proses ideologisasi dalam kelompok masyarakat, atas nama demokrasi dan identitas apa pun, masyarakat Indonesia (tentu tidak hanya di Indonesia) semakin sulit memahami perbedaan, merasa paling benar dan paling berhak atas kehidupannya sendiri. Negara seolah tidak berdaya dan tidak memiliki kemampuan apa pun yang secara signifikan ikut menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara yang demokratis, berkeadilan, dan secara kondusif dapat diterima oleh berbagai kalangan yang saling berhadapan.

3. Memanfaatkan Ruang Ketiga

Memang, terdapat gejala lain yang berdiri di antara kedua kecenderungan tersebut. Dengan keterbatasan dalam mengeksplorasi dan menghadirkan data sejarah, film *Gie* (2005) merupakan contoh yang cukup baik bagaimana sejarah dan praktik politik di Indonesia dipersoalkan, bagaimana politik seketarian (terutama aktivitas politik di kampus) agak ditertawakan. Di samping itu, walaupun masih bersifat "reaksionis", beberapa lagu Dewa, misalnya "Laskar Cinta" (Republik Cinta, 2005), lagu yang cukup digemari masyarakat Indonesia, merupakan contoh pewacanaan dalam cara-cara kesenian untuk memobilisasi rasa cinta.....// Laskar cinta, sebarlah benih-benih cinta, musnahkanlah virus-virus benci, virus yang bisa rusak jiwa dan busukkan hati, laskar cinta, ajarkanlah ilmu tentang cinta, karena cinta adalah hakikat dan jalan yang terang bagi semua umat manusia//. Kelebihan lagu Dewa ini adalah walaupun pesan yang coba dikedepankan berasal

dari sumber Islam, pesan tersebut dikemas secara profan dengan substansi yang agnostik.

Program Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata membuat film mengenai kekayaan budaya lokal dari setiap provinsi, yang akan dikemas dalam paket berisi 33 video *compact disc*, tentu perlu disambut dengan baik. Paket VCD itu akan dibagi-bagikan ke sekolah, terutama SD, agar dapat ditayangkan saat pelajaran berlangsung. Misalnya, kalau pembuatan film tersebut tidak dikemas dalam cara-cara berkesenian yang canggih, tidak tertutup kemungkinan yang terjadi adalah ajang verbalisasi dan "dakwah" yang tidak menyentuh hati masyarakat. Jika itu yang terjadi, hal itu sebetulnya hanya akan mengulangi buku pelajaran lain yang hingga hari ini masih dibaca oleh para pelajar kita. Sebagai contoh, berikut dikutipkan salah satu teks IPS untuk siswa SD.

Seperti kalian ketahui bahwa wilayah Indonesia dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan beraneka ragam kebudayaannya. Banyaknya suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia berpotensi terjadinya perpecahan. Lebih berbahaya lagi kalau ada wilayah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu tidak boleh terjadi, NKRI merupakan pilihan terakhir bagi bangsa Indonesia. Untuk menjaga keutuhan negara kita maka kita harus bersatu. Persatuan patut diutamakan walaupun kita terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya yang berbeda. Keragaman suku bangsa merupakan modal utama dalam mempertahankan negara dan bangsa Indonesia.

Paragraf di atas merupakan contoh yang baik bagaimana ideologi negara otoriter telah melumpuhkan penalaran paragraf tersebut. Paragraf tersebut dibuka dengan kalimat; *Seperti kalian ketahui bahwa wilayah Indonesia dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan beraneka ragam kebudayaannya*. Jadi, ide utamanya adalah adanya berbagai suku bangsa dan beraneka ragam kebudayaan. Akan tetapi, ide itu tidak diikuti oleh penjelasan letak keragamannya. Justru keragaman itu dapat menimbulkan perpecahan. Kalimat tersebut jelas suatu nalar dalam kepentingan negara, bukan tulisan yang dapat mengembangkan paragraf berpikir kritis dan memahami sesuatu.

Kalimat tersebut diikuti kalimat berikut. *Lebih berbahaya lagi kalau ada wilayah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. Penjelasan kalimat itu jelas pembodohan. Apa hubungan keragaman (yang tidak dijelaskan itu) sehingga menimbulkan konflik.

Kalau kenyataannya saat ini banyak konflik dan ada wilayah-wilayah yang ingin memisahkan dari NKRI, itu bukan karena adanya keragaman, tetapi buruknya negara dalam mengelola keragaman itu. Kita tidak pernah paham bagaimana mengelola perbedaan dari berbagai keragaman yang ada. Tanpa pengetahuan dan penghormatan terhadap keragaman, hal yang harus kita lakukan adalah bersatu dalam keragaman yang merupakan sesuatu yang sulit untuk dipraktikkan.

Dengan demikian, diperlukan adanya ruang ketiga, ruang antara, atau meminjam istilah Bhabha (1994:3-4) ruang *liminality, in between, third space*, yakni ruang perjumpaan perbedaan-perbedaan kultural dan sekaligus ruang perjumpaan identitas tempat terjadinya gerak interaktif terus menerus di antara status yang berbeda, yaitu “mereka yang merasa dieksklusi”, dengan mereka yang dituduh “mengeksklusi”, apalagi mengingat bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, terdiri atas berbagai suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kebudayaan dalam arti yang luas. Negara selayaknya ikut membantu meminimalkan dan melakukan berbagai konsolidasi melalui ruang ketiga tersebut, berbagai keinginan dan hasrat untuk mendominasi orang lain dan/atau kelompok masyarakat tertentu lewat politik identitas, memanipulasi simbol-simbol agama, dan menciptakan kesadaran palsu melalui dan/atau atas nama politik atas nama apa pun.

Itulah sebabnya, negara selayaknya kembali memainkan peranan penting dalam membangun ruang imajinasi agar perbedaan dan keragaman justru merupakan rahmat yang harus disyukuri bersama. Ruang itu “secara cerdas” pernah dimanfaatkan oleh pemerintah Orde Baru, terutama aparaturnya, dengan pembuatan film *Pengkhianatan G 30 S/PKI* (1984), atau juga seperti tampak pada film-film *Enam Djam di Jogja, Janur Kuning*, dan *Serangan Fajar*, yang pernah dibicarakan Budi Irawanto (1999). Akan tetapi, tentu saja bukan film seperti itu yang dimaksudkan. Bukan saja film tersebut bermasalah bagi tumbuhnya kesadaran terhadap kebanggaan Indonesia, melainkan sangat mungkin justru menimbulkan “rasa benci” terhadap sejarah Indonesia.

Seperti telah disinggung, pada akhirnya, masyarakat mengambil inisiatif sendiri. Ini juga menjadi salah satu ciri yang menarik ketika era Reformasi ditandai berbagai upaya untuk “memperbaiki segala hal yang tidak beres dari Orde Baru”. Setiap orang atau kelompok

masyarakat berpeluang bebas untuk melakukan banyak hal tanpa ada rasa sungkan. Konsentrasi perbaikan tersebut tampaknya terjadi dalam dunia politik. Banyak orang, dengan segala macam cara, mengharu-biru dunia politik Indonesia. Dalam dunia seni, khususnya sinetron dakwah seperti banyak ditayangkan di televisi, politik masyarakat dalam berkesenian adalah dengan melakukan terapi-terapi internal di dalam dirinya, yakni dengan upaya “menakut-nakuti”, bahwa jika kemaksiatan tersebut terus dilakukan, Anda pasti akan masuk neraka. Terapi penakutan tersebut, misalnya, adalah dengan menghukum secara langsung berbagai kejahatan yang dilakukan, bukan saja ancaman terhadap hukuman di akhirat, tetapi juga di dunia. Sebagai risikonya, dunia kesenian justru banyak diperankan oleh para “petualang”, baik bisnis maupun politik. Kesempatan bermain dengan wacana terapi penakutan tersebut pun menjadi komoditas. Kita tahu banyak seniman terjebak dalam permainan tersebut.

Permasalahannya adalah bahwa kesenian terjebak dalam verbalisasi yang tidak menjelaskan apa-apa sehingga tidak memiliki kemampuan yang tinggi menyentuh kesadaran masyarakat. Sinetron kita bukan cerita yang menyentuh rasa dan kesadaran dalam diri masyarakat, melainkan hanya berupa ceramah yang dibungkus oleh cerita. Seperti sinetron dakwah *Rahasia Illahi, Doa Membawa Berkah, Titipan Illahi, Azab Tuhan, Azab Dunia, Anakku Bukan Anakku, Hanya Tuhan yang Tahu, Tuhan Ada di Mana-mana, Takdir Illahi, Suratun Takdir, Kafir, Di Balik Kuasa Tuhan, Taubat, Azab Illahi, Sakratul Maut, Istigfar*, dan sebagainya. Negara tentu senang melihat fenomena tersebut karena dari cerita sinetron yang berjubah di dalamnya ada upaya untuk membentuk manusia religius yang saleh dan bertakwa. Negara jelas membutuhkan masyarakat yang religius dan saleh. Masalahnya hingga hari ini tidak pernah ada bukti yang signifikan bahwa sinetron yang menakut-nakuti itu menyebabkan masyarakat menjadi takut untuk berbuat kemaksiatan. Mungkin yang menonton adalah mereka yang memang orang baik-baik saja atau kedua, yang berbuat jahat tidak pernah tertarik atau tidak pernah sempat menonton sinetron.

Di samping itu, kesenian menjadi bermasalah karena kepentingan dan sudut pandang yang berbeda-beda dalam memahami dan mengapresiasi peristiwa kesenian. Tidak jarang kesenian justru menjadi ajang tersendiri dalam menimbulkan konflik yang menimbulkan ancaman

kekerasan. Kasus logo VCD Band Dewa *Album Laskar Cinta* (2005) mendapat gugatan yang ramai dari kelompok-kelompok Islam tertentu. Seolah seni dan Islam yang benar adalah seperti yang disuarakan oleh kelompok Islam tertentu tersebut. Dalam kejadian itu, mengherankan, negara (pemerintah yang diberi mandat) dengan aparaturnya, misalnya Majelis Ulama Islam (MUI) tidak mengambil peranan strateis dalam menjelaskan kemungkinan adanya interpretasi yang berbeda.

Akibatnya, dalam rentang waktu yang cukup panjang, hingga hari ini kita belum memiliki satu produksi dan hasil kesenian, dalam pengertian luas yang memberi wacana imajinatif terhadap proses-proses yang membanggakan menjadi warga Indonesia. Suatu hasil kesenian, yang mendapat dukungan sepenuhnya dari negara, yang memberi pelajaran dan penghormatan terhadap kemajemukan dan keunikan dan dalam proses penegakan demokrasi, hukum, dan keadilan berbangsa. Seniman-seniman film Amerika dan Inggris, misalnya, memang mengambil inisiatif-inisiatif sendiri dalam membuat film. Akan tetapi, negara secara kondusif mendukung sepenuhnya untuk terlibat jika diperlukan, termasuk menggunakan segala alat dan dokumen, untuk keperluan pembuatan film. Tidak ada ketakutan mengkritik presiden atau Ratu Inggris jika yang diperjuangkan adalah nilai-nilai manusia atau keunggulan bangsa Amerika atau Inggris, seperti kejujuran, sportivitas, dan sikap bertanggung jawab atas kemanusiaannya.

Seniman Amerika hingga kini masih merasa perlu untuk memelihara kebanggaan itu terus menerus dengan membuat film yang selalu memompa semangat untuk menjadi bangsa Amerika. Pada tahun 1980-an hingga 1990-an awal, film *Missing in Action* yang dibintangi aktor terkenal Chuck Norris, atau film *Rambo*, yang dibintangi Sylvester Stallone, membuat orang Amerika selalu heroik dengan kepahlawanannya. Belakangan, di awal tahun 2000-an, film *Postman, Gods and Generals*, dan *Cold Mountain* adalah segelintir film yang membuat bangga menjadi orang Amerika. Dalam adegan terakhir film *The Postman* yang dibintangi Kevin Costner, sang tokoh, si pengantar surat, dalam ancaman maut, pisau tajam sedang menghujam di wajah, digertak oleh antagonisnya. "Kau ingin menjadi jagoan, kau ingin menjadi pahlawan, kau percaya pada Tuhan." Jawaban sang tokoh, "Tidak, saya tidak percaya pada itu. Saya hanya percaya pada kesatuan

bangsa Amerika." Kita tahu bahwa orang Amerika begitu bergembira dengan keamerikaannya. Film-film Amerika itu tidak sedang membanggakan peran militer atau bahkan pengantar surat yang terlupakan, tetapi memperjuangkan keluhuran moral, memperjuangkan kemanusiaan.

Kemudian, banyak orang bertanya, apa perlunya nasionalisme (keindonesiaan)? Teman saya Mikihiro Moriyama, yang menulis disertasi tentang sastra Sunda bertanya, "Apa perlu nasionalisme. Kami orang Jepang merasa tidak perlu," katanya. Saya jawab, "Untuk orang Jepang mungkin tidak perlu. Ada dan tidak ada nasionalisme Jepang, orang Jepang hidup dalam perekonomian yang baik, berbagai peraturan dan hukum relatif jalan. Pembangunan berjalan dengan damai dan sukses. Selain itu, kita tahu bahwa orang Jepang bangga dengan kejepangannya. Saya ragu, apakah orang Indonesia bangga dengan keindonesiaannya. Paling tidak Taufik Ismail sudah berpuisi dengan kemaluannya menjadi orang Indonesia. Saya cuma bisa berharap, mana tahu dengan munculnya kembali rasa persaudaraan dan senasib sepenanggungan sesama orang Indonesia, konflik dan kerusuhan bisa ditekan. Mana tahu, dengan kembalinya bersama-sama semangat dan bangga menjadi bangsa Indonesia, kita kembali bisa bersama-sama membangun negeri Indonesia dengan penuh gairah."

Namun, kesadaran-kesadaran baru selalu dan telah bermunculan terhadap berbagai kondisi yang tidak kondusif tersebut. Sejumlah seniman, sastrawan, dan penyair juga telah memperlakukan hal tersebut dan mereka memperlihatkan hal tersebut ke dalam karya mereka. Akan tetapi, wacana ruang ketiga tersebut tidak mendapat dukungan yang kondusif dari negara. Akibatnya, wacana tersebut tidak lebih menjadi kegiatan "swasta" dan pribadi yang hanya mampu bergerak dalam ruang-ruang yang terbatas. Memang negara, misalnya, memberikan sejumlah subsidi terhadap beberapa karya sastra agar diterbitkan secara nasional. Akan tetapi, bahkan dalam praktiknya program tersebut tidak lebih sebagai suatu proyek "berbagi kemiskinan". Masyarakat terlanjur belum mampu melihat seberapa penting ruang ketiga tersebut dapat dijadikan ruang negosiasi dan konsolidasi bagi

Kesadaran baru selalu dan telah bermunculan terhadap berbagai kondisi yang tidak kondusif

proses-proses pembangunan dalam pengertian luas, ke depan.

4. Simpulan

Dalam proses transisi bernegara ke arah yang lebih demokratis, pemerintah yang diberi mandat (negara) sering gagap dalam dirinya dalam melakukan berbagai proses negosiasi dan konsolidasi. Masa transisi itu menyebabkan masyarakat melakukan berbagai gerakan politisasi dan mengambil kesempatan berpartisipasi, baik dalam rangka konsolidasi sosial maupun terutama dalam rangka perebutan akses politik dan ekonomi. Situasi itu dapat berbahaya jika berlangsung terus karena jika negara tidak segera mengambil peranan strategis dalam mengatasi persoalan tersebut. Politik atas nama demokrasi, "dalam berbagai bentuknya", akan semakin melemahkan kinerja berbangsa dan bernegara.

Itulah sebabnya, saya merekomendasikan agar negara dengan dan secara serius mengelola ruang alternatif atau ruang ketiga untuk melakukan berbagai proses negosiasi dan konsolidasi tersebut. Alternatif itu dimungkinkan oleh ruang-ruang seni, baik dalam pengertian fisik maupun nonfisik, yakni segala hal yang berkaitan dengan sastra, sinema dan/atau film, musik, dan sebagainya. Hal tersebut tentu dengan tetap menempatkan seni dan sastra sebagai suatu ajang kreativitas dan imajinasi yang bebas dari berbagai tekanan sehingga ruang ketiga atau ruang alternatif tersebut dapat berfungsi maksimal.

Catatan Akhir:

1. Lihat prosiding Kongres Cerpen Indonesia IV, Ayo Estetika Lokal!, khususnya tulisan Maman S. Mahayana. "Perjalanan Estetika Lokal Cerpen Indonesia." Pekanbaru, 26-30 November 2005.
2. Istilah kota terutama memang dimaksudkan kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, atau bahkan Yogyakarta. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk daerah juga memiliki kotanya sendiri, dan secara teknologis terhubungkan. Hal ini secara langsung berhubungan dengan tingkat pendidikan dan kemampuan mengakses teknologi sehingga banyak warga menjadi bagian dari masyarakat jaringan walaupun ia berdomisili di kota kecil di sebuah pelosok di Indonesia.
3. Bandingkan dengan keterangan Arief Budiman, 1996. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia
4. Lihat dan bandingkan juga dengan tesis Francis Fukuyama, 2005. *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. Jakarta: Gramedia.
5. *Kompas*, Kamis 23 Februari 2006, hlm. 12.
6. Tim Bina Guru, 2002. *Pengetahuan Sosial Terpadu untuk SD Kelas IV*. Jakarta: Erlangga. Paragraf senada dapat ditemukan dalam Nanang Cahyadi, 2004. *Pengetahuan Sosial 4 untuk Sekolah Dasar Kelas 4*. Jakarta: Balai Pustaka.
7. Lihat juga kajian menarik dari Niels Mulder, 2003. *Wacana Publik Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

Daftar Pustaka

- Babha, Homi K. 1994. *The Location of Culture*. London and New York: Routledge.
- Budiman, Arief. 1996. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia.
- Cahyadi, Nanang. 2004. *Pengetahuan Sosial 4 untuk Sekolah Dasar Kelas 4*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Castells, Manuel. 2001. *The Rise of The Network Society*. Oxford: Balckwell.
- Dee (Dewi Lestari). 2001. *Supernova*. Bandung : Trudee Books.
- Fukuyama,, Francis. 2005. *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Irawanto Budi. 1999. *Film, Ideologi, dan Militer Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Kompas. 23 Februari 2006.
- Kuntowijoyo, 2000. *Mantra Penjinak Ular*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Kuntowijoyo. 2003. *Wasripin dan Satinah*. Jakarta: Kompas.
- Mahayana, Maman S. 2005. "Perjalanan Estetika Lokal Cerpen Indonesia." Dalam Prosiding Kongres Cerpen Indonesia IV, 2005. Ayo Estetika Lokal!, Pekanbaru, 26-30 November.
- Mulder, Niels. 2003. *Wacana Publik Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nuranindya, Dyan. 2005. *Dealova*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Bina Guru. 2002. *Pengetahuan Sosial Terpadu untuk SD Kelas IV*. Jakarta: Erlangga.
- Utami, Ayu. 1999. *Saman*. Jakarta: Gramedia.

Film/CD:

- Pengkhianatan G 30 S/PKI* (1984), *The Postman* (1977), *Cold Mountain* (2003), *Dealova* (2005), *Cinta Silver* (2005), *Gie* (2005), dan *Republik Cinta* (Dewa, 2005)